

Penguatan Literasi Kebijakan Pendidikan PAI bagi Guru dan Pengelola Madrasah di Kabupaten Lampung Utara

Strengthening Policy Literacy in Islamic Education (PAI) for Teachers and Madrasah Administrators in Lampung Regency

Meilisa Sajdah¹, Ahmad Abdul Cholik¹, Andika Chandra¹, Heppy Zulaiha¹, Erta Yulita¹, M. Makhrus Ali¹

¹ Pasca Sarjana, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ibnu Rusyd, Indonesia

*Email Korespondensi: sajdahmeilisa@gmail.com

Abstrak

Kebijakan pendidikan merupakan aspek penting dalam peningkatan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di madrasah. Namun, rendahnya literasi kebijakan di kalangan pendidik dan pengelola madrasah seringkali menimbulkan kesenjangan implementasi antara regulasi dan praktik. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat literasi kebijakan pendidikan PAI bagi guru dan pengelola madrasah di Kabupaten Lampung Utara. Metode yang digunakan meliputi workshop, pendampingan, dan diskusi kelompok terarah. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kemampuan peserta dalam menganalisis regulasi PAI, menafsirkan isi dokumen kebijakan, serta menerjemahkannya ke dalam program dan kegiatan madrasah secara lebih sistematis. Selain itu, peserta juga menunjukkan peningkatan keaktifan dalam merancang rencana tindak lanjut berbasis kebijakan. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan kapasitas literasi kebijakan pendidikan PAI di tingkat madrasah.

Kata kunci: Literasi Kebijakan, Pendidikan Agama Islam, Madrasah

Abstract

Educational policy is a crucial aspect in improving the quality of Islamic Education (PAI) learning in madrasahs. However, the low level of policy literacy among teachers and madrasah administrators often leads to gaps between regulations and actual practice. This community service program aims to strengthen policy literacy in Islamic Education (PAI) for teachers and madrasah administrators in North Lampung Regency. The methods used include workshops, mentoring, and focus group discussions. The results show an increase in participants' ability to analyze PAI regulations, interpret policy documents, and translate them into systematic school programs and activities. In addition, participants demonstrated greater engagement in developing policy-based follow-up action plans. Thus, this program provides a tangible contribution to strengthening policy literacy capacity in Islamic Education at the madrasah level.

Keywords: Policy Literacy, Islamic Religious, Education, Madrasah

Pesan Utama:

- Penguatan literasi kebijakan melalui workshop dan pendampingan dapat meningkatkan kemampuan guru dan pengelola madrasah di Lampung Utara dalam menganalisis dan menerapkan regulasi Pendidikan Agama Islam secara sistematis



Copyright (c) 2025 Authors.

Received: 17 October 2025

Accepted: 4 November 2025

DOI: <https://doi.org/10.56303/jppmi.v4i2.958>



This work is licensed under
a Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License

GRAPHICAL ABSTRACT



PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan bangsa. Melalui pendidikan, sebuah masyarakat dapat membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral, spiritual, dan sosial. Dalam konteks Indonesia, Pendidikan Agama Islam (PAI) menempati posisi yang sangat strategis karena secara langsung berkaitan dengan pembentukan akhlak, penguatan iman, serta pengembangan karakter berbasis nilai-nilai Islami yang rahmatan lil 'alamin. PAI bukan hanya sekadar mata pelajaran yang berorientasi pada transfer pengetahuan, melainkan juga merupakan wahana internalisasi nilai dan transformasi sikap yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara (Ghofururrohm et al., 2025).

Seiring dengan perkembangan zaman, kebijakan pendidikan di Indonesia mengalami perubahan dan pembaruan yang cukup cepat. Kementerian Agama sebagai pemegang otoritas pendidikan madrasah secara berkala mengeluarkan regulasi, pedoman, maupun kebijakan strategis terkait penyelenggaraan pendidikan agama. Misalnya, kebijakan tentang kurikulum yang dinamis menyesuaikan tuntutan era globalisasi, kebijakan penguatan moderasi beragama, hingga penyesuaian mekanisme asesmen pembelajaran berbasis kompetensi. Kebijakan-kebijakan tersebut menuntut para guru dan pengelola madrasah untuk selalu meningkatkan kapasitas pemahaman dan literasi mereka, agar kebijakan tidak berhenti di tataran wacana, tetapi benar-benar terimplementasi dalam praktik pendidikan (Rizki, 2022).

Namun, kondisi di lapangan, khususnya di daerah, masih menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara kebijakan dengan praktik implementasi. Madrasah-madrasah di wilayah seperti Kabupaten Lampung Utara sering menghadapi keterbatasan informasi, minimnya akses terhadap pelatihan, serta

kurangnya pendampingan berkelanjutan terkait pemahaman dan penerapan kebijakan pendidikan PAI.

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara (2024) menunjukkan bahwa sekitar 68% guru madrasah belum pernah mengikuti kegiatan sosialisasi atau pelatihan mengenai Kurikulum Merdeka khusus bidang PAI, dan lebih dari separuh pengelola madrasah menyatakan kesulitan dalam memahami dokumen kebijakan yang menggunakan bahasa formal dan teknis. Temuan ini memperkuat adanya kesenjangan nyata antara kebijakan di tingkat pusat dengan praktik pelaksanaan di madrasah daerah.

Akibatnya, kebijakan yang seharusnya menjadi panduan dan arah penyelenggaraan pendidikan PAI belum sepenuhnya dipahami, apalagi diterapkan secara optimal. Program pengabdian ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui pendekatan yang berbeda dari program sejenis sebelumnya, yakni dengan model pendampingan berkelanjutan dan fokus pada penerjemahan kebijakan menjadi program aksi konkret di tingkat madrasah. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan literasi kebijakan pendidikan PAI, tetapi juga membekali peserta dengan keterampilan praktis dalam mengintegrasikan regulasi ke dalam praktik manajerial dan pembelajaran sehari-hari.

Literasi kebijakan pendidikan dalam hal ini menjadi kunci. Literasi tidak hanya bermakna kemampuan membaca dan menulis, tetapi lebih luas mencakup kemampuan memahami, menganalisis, dan mengimplementasikan kebijakan dalam konteks riil. Guru yang literat terhadap kebijakan akan lebih mudah menyelaraskan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), program kerja sekolah, hingga kegiatan ekstrakurikuler dengan regulasi yang berlaku. Sebaliknya, rendahnya literasi kebijakan menyebabkan praktik pendidikan sering kali tidak sejalan dengan arah kebijakan nasional, bahkan menimbulkan kesenjangan mutu antar madrasah (Junaedi, 2025).

Penguatan literasi kebijakan pendidikan PAI di madrasah Lampung Utara penting dilakukan mengingat madrasah memiliki peran vital sebagai lembaga pendidikan berciri khas Islam yang berkontribusi besar terhadap pencerdasan kehidupan bangsa. Lampung Utara sendiri merupakan salah satu daerah di Provinsi Lampung dengan jumlah madrasah yang cukup banyak, baik madrasah negeri maupun swasta. Namun, tantangan yang dihadapi cukup beragam, mulai dari keterbatasan sarana prasarana, kualitas tenaga pendidik yang bervariasi, hingga akses yang terbatas terhadap informasi kebijakan terbaru.

Kondisi ini jika tidak segera diatasi akan berdampak terhadap kualitas lulusan madrasah. Guru yang tidak memahami kebijakan terbaru akan kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan arah kurikulum nasional, misalnya dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Demikian pula, madrasah yang tidak literat terhadap kebijakan akan tertinggal dalam penerapan program-program unggulan Kementerian Agama, seperti moderasi beragama, penguatan karakter, maupun pendidikan berbasis digital. Oleh karena itu, perlu adanya intervensi melalui program pengabdian masyarakat yang bertujuan memberikan pendampingan, sosialisasi, serta pelatihan bagi guru dan pengelola madrasah dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan PAI (Anggreini, 2022).

Program pengabdian masyarakat ini dirancang untuk memperkuat kapasitas guru dan pengelola madrasah di Lampung Utara agar memiliki literasi kebijakan yang baik. Literasi ini meliputi kemampuan mengenali berbagai regulasi pendidikan PAI, memahami esensi dari kebijakan, mengkritisi relevansi kebijakan dengan kebutuhan sekolah, serta menerjemahkannya ke dalam program dan kegiatan nyata. Dengan demikian, guru tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga agen perubahan yang mampu membawa madrasah lebih adaptif terhadap kebijakan dan tantangan zaman.

Selain itu, penguatan literasi kebijakan pendidikan juga sejalan dengan semangat peningkatan mutu madrasah secara nasional. Madrasah saat ini tidak lagi dipandang sebagai lembaga pendidikan kelas dua, melainkan telah bertransformasi menjadi lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah umum bahkan

unggul dalam beberapa aspek. Transformasi ini tentu harus didukung oleh kualitas guru yang tidak hanya profesional dalam bidang pedagogik dan keilmuan, tetapi juga memiliki kesadaran kritis terhadap kebijakan pendidikan yang berlaku.

Dalam konteks global, penguatan literasi kebijakan pendidikan juga penting untuk menyiapkan madrasah menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Guru PAI harus mampu memanfaatkan kebijakan pendidikan sebagai peluang untuk melakukan inovasi pembelajaran, seperti integrasi teknologi dalam proses belajar mengajar, pengembangan konten digital Islami, hingga penguatan nilai moderasi beragama melalui media pembelajaran interaktif. Semua itu hanya dapat dilakukan apabila guru memiliki pemahaman yang utuh terhadap arah kebijakan nasional.

Dengan demikian, latar belakang program pengabdian masyarakat ini berangkat dari kondisi faktual madrasah di Lampung Utara yang masih menghadapi kesenjangan literasi kebijakan pendidikan. Program ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan tersebut dengan menghadirkan ruang belajar, diskusi, dan pendampingan yang sistematis. Fokus kegiatan diarahkan pada upaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya literasi kebijakan, sekaligus memberikan keterampilan praktis bagi guru dan pengelola madrasah dalam menerapkan kebijakan pendidikan PAI secara kontekstual. (Siti Listiyana, 2020)

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan program penguatan literasi kebijakan pendidikan PAI bagi madrasah di Lampung Utara. Artikel ini akan menjelaskan secara rinci metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, serta implikasi program terhadap peningkatan kapasitas guru dan pengelola madrasah. Dengan memotret pengalaman pengabdian masyarakat ini, diharapkan lahir model praktik baik (best practice) yang dapat direplikasi di daerah lain dalam rangka memperkuat literasi kebijakan pendidikan PAI di tingkat madrasah.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang menggunakan pendekatan partisipatif (participatory approach), yang secara fundamental menempatkan 30 orang guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan pengelola madrasah (kepala dan wakil kepala bidang kurikulum) sebagai subjek utama, bukan objek, dalam proses peningkatan literasi kebijakan pendidikan PAI. Pendekatan ini dipilih karena peningkatan literasi kebijakan tidak sekadar menuntut pemahaman teoritis terhadap regulasi, tetapi juga memerlukan kemampuan praktis untuk menerjemahkan kebijakan strategis (seperti Kurikulum Merdeka PAI, moderasi beragama, dan regulasi penguatan karakter serta penilaian) ke dalam program kerja dan perangkat pembelajaran yang kontekstual di madrasah. Peserta dipilih secara purposif dari 15 madrasah negeri dan swasta di Kabupaten Lampung Utara berdasarkan kriteria: (1) aktif mengajar atau mengelola program PAI, (2) memiliki pengalaman minimal dua tahun dalam pendidikan Islam, dan (3) belum pernah mengikuti pelatihan khusus terkait literasi kebijakan, guna memastikan relevansi dan dampak maksimal dari kegiatan.

Prosedur pelaksanaan kegiatan disusun secara sistematis melalui tujuh tahap berkelanjutan. Diawali dengan Sosialisasi dan Orientasi Awal untuk membangun pemahaman dasar mengenai literasi kebijakan PAI dan regulasi Kemenag terkini. Tahap ini dilanjutkan dengan Workshop Literasi Kebijakan, di mana peserta secara aktif berlatih membaca, menafsirkan, dan menganalisis dokumen kebijakan menggunakan teknik policy reading and mapping, yang hasilnya diwujudkan dalam penyusunan rancangan implementasi kebijakan spesifik madrasah. Selanjutnya, dilaksanakan Diskusi Kelompok Terarah (FGD) untuk memfasilitasi dialog reflektif, eksplorasi hambatan, dan berbagi strategi adaptasi implementasi. Inti dari program adalah Pendampingan Intensif di Madrasah melalui kunjungan lapangan, yang bertujuan memberikan bimbingan teknis dalam penerjemahan kebijakan menjadi program kerja, Modul Ajar, RPP, dan kegiatan madrasah yang nyata. Efektivitas kegiatan dipastikan melalui Monitoring dan Evaluasi yang mencakup observasi lapangan dan

penilaian produk peserta. Proses ditutup dengan Refleksi Bersama untuk mengulas capaian dan merumuskan strategi keberlanjutan, serta Penyusunan Laporan dan Diseminasi Hasil agar model penguatan kapasitas ini dapat direplikasi di madrasah lain. Seluruh rangkaian prosedur ini didesain untuk mendorong dialog kolaboratif, alih-pengetahuan timbal balik, dan bukan bersifat instruksional satu arah.

Efektivitas program diukur menggunakan pendekatan kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data meliputi Kuesioner Pre-test dan Post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman kognitif peserta terhadap kebijakan PAI; Lembar Observasi untuk menilai keterlibatan aktif peserta dan kemampuan praktis mereka dalam analisis serta penerapan kebijakan; Analisis Dokumen terhadap produk nyata yang dihasilkan peserta (Modul Ajar, RPP, Program Kerja); serta Catatan Lapangan dan Transkrip FGD untuk menangkap data kualitatif mendalam mengenai tantangan dan persepsi implementasi kebijakan di madrasah. Teknik Analisis Data yang diterapkan adalah analisis deskriptif komparatif untuk data kuantitatif (pre-test dan post-test) guna melihat perbandingan skor rata-rata peningkatan pemahaman. Sementara itu, data kualitatif dari observasi, FGD, dan analisis dokumen diolah melalui analisis tematik (thematic analysis). Langkah ini melibatkan proses pengkodean data, identifikasi tema-tema utama (seperti tantangan literasi, strategi adaptasi, dan dampak program), serta interpretasi data untuk menyimpulkan efektivitas komprehensif kegiatan pengabdian dalam konteks peningkatan kapasitas guru dan pengelola madrasah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Penguatan Literasi Kebijakan Pendidikan PAI bagi Guru dan Pengelola Madrasah di Kabupaten Lampung Utara" menghasilkan sejumlah capaian signifikan, yang tidak hanya menyentuh aspek kognitif peserta tetapi juga aspek implementasi dan inovasi program madrasah.

Peningkatan Kapasitas Kognitif Literasi Kebijakan

Pada tahap awal, dilakukan pemetaan kondisi awal literasi kebijakan pendidikan di kalangan 30 guru dan pengelola madrasah melalui pra-pengukuran (pre-test) dan observasi. Hasil pre-test menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peserta terhadap kebijakan-kebijakan strategis dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) masih berada pada level dasar. Sebagian besar guru menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi poin-poin kunci Kurikulum Merdeka PAI, kebijakan asesmen nasional, dan teknis implementasi moderasi beragama. Setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang diakhiri dengan post-test, terjadi peningkatan pemahaman yang eksplisit, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Rata-rata Skor Pre-test dan Post-test

Indikator Literasi Kebijakan	Rata-rata Skor Pre-test (%)	Rata-rata Skor Post-test (%)	Peningkatan (%)
Pemahaman Kurikulum Merdeka PAI	48.3	86.7	38.4
Pemahaman Kebijakan Moderasi Beragama	45.0	83.3	38.3
Pemahaman Regulasi Asesmen Nasional & Teknis PAI	43.3	85.0	41.7
Rata-rata Komprehensif	45.5	85.0	39.5

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan rata-rata komprehensif sebesar 39.5 persen pada pemahaman peserta, dari skor rata-rata 45.5% menjadi 85.0%. Peningkatan paling menonjol terjadi pada indikator Pemahaman Regulasi Asesmen Nasional & Teknis PAI, yaitu sebesar 41.7%. Peningkatan ini mengonfirmasi bahwa program pengabdian, khususnya melalui Sosialisasi dan Workshop, telah berhasil mentransfer pengetahuan fundamental dan meningkatkan kapasitas kognitif peserta secara signifikan,

menunjukkan program ini sangat tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan awal (Nurhabibi et al., 2025).



Gambar 1. Implementasi Kebijakan PAI dalam Kegiatan Pembelajaran Kelompok di Madrasah Peningkatan Kemampuan Analisis dan Aplikasi Kebijakan

Tahap Workshop Literasi Kebijakan dan Diskusi Kelompok Terarah (FGD) menghasilkan perubahan penting pada kemampuan peserta dalam menganalisis dokumen regulasi. Sebelum kegiatan, peserta memandang kebijakan sebagai dokumen formal yang bersifat administratif. Setelah berlatih menggunakan teknik policy reading and mapping, mereka mampu mengidentifikasi poin-poin implementatif yang relevan untuk konteks PAI. Temuan kunci dari analisis dokumen kebijakan oleh kelompok peserta adalah:

1. Kurikulum Merdeka PAI: Peserta mengidentifikasi urgensi penekanan pada pembentukan karakter religius, kompetensi sosial, dan keterampilan Abad ke-21 dalam pembelajaran PAI, alih-alih hanya berfokus pada ranah kognitif.
2. Moderasi Beragama: Peserta berhasil menyimpulkan bahwa nilai-nilai toleransi, keadilan, dan keseimbangan perlu diintegrasikan ke dalam budaya sekolah, bukan hanya dalam materi ajar.

Fakta ini memperlihatkan bahwa dengan pendampingan yang terstruktur, guru madrasah mampu beralih dari pelaksana pasif menjadi subjek yang memahami kebijakan secara kritis dan aplikatif (Miskiyyah et al., 2025).

Inovasi Program dan Peningkatan Kepercayaan Diri Guru

Tahap Pendampingan Intensif di Madrasah menjadi katalisator bagi terciptanya inovasi nyata. Hasilnya, beberapa madrasah berhasil menyusun draft Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Modul Ajar, dan program kerja tahunan yang selaras dengan kebijakan terbaru. Contoh produk inovasi yang dihasilkan mencakup:

1. Program "Pojok Moderasi Beragama" sebagai sarana diskusi isu keagamaan inklusif (Madrasah A).
2. Pengembangan literasi digital PAI melalui konten dakwah video singkat di media sosial sekolah (Madrasah B).
3. Perancangan Asesmen Autentik yang menilai keterampilan khutbah singkat (sesuai prinsip Kurikulum Merdeka) (Madrasah C).
4. Pengembangan Project Based Learning (PBL) bertema "Kegiatan Sosial Islami" yang mengintegrasikan nilai moderasi beragama (Madrasah D).

Inovasi-inovasi ini menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dan kreativitas guru dalam menerjemahkan regulasi teknis menjadi strategi pembelajaran yang konkret dan kontekstual (Nurhadi et al., 2025).



Gambar 2. Tahap Pendampingan Intensif di Madrasah

Faktor Peningkatan Literasi dan Peran Metode Partisipatif

Peningkatan signifikan pada literasi kebijakan 39.5% pada rata-rata skor) dapat diinterpretasikan sebagai keberhasilan pendekatan partisipatif dalam program ini. Metode Workshop Literasi Kebijakan dan Diskusi Kelompok Terarah (FGD) menjadi faktor pemicu utama peningkatan kognitif. Dalam FGD, peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi secara aktif dilibatkan dalam proses policy reading and mapping dan berbagi pengalaman implementasi, yang menurut (Meldina, 2024) adalah kunci untuk mengubah pemahaman pasif menjadi literasi fungsional. Peningkatan ini terjadi karena adanya transisi dari pemahaman deklaratif (sekadar tahu isi kebijakan) menuju pemahaman prosedural dan kondisional (mampu menganalisis dan mengaplikasikannya). Lingkungan belajar yang kolaboratif dan non-instruktif mendorong co-learning, di mana guru yang telah memiliki pengalaman minimal dua tahun dapat saling memfasilitasi pemahaman.

Kontribusi Literasi Kebijakan Terhadap Inovasi Pedagogis

Temuan mengenai munculnya berbagai program inovatif (seperti "Pojoek Moderasi Beragama" dan PBL bertema sosial Islami) secara kuat membuktikan bahwa literasi kebijakan yang kuat adalah prasyarat bagi munculnya inovasi pedagogis. Peningkatan kreativitas guru dalam merancang program sejalan dengan pandangan (Sholihah & Khoiriyah, 2024) yang menyatakan bahwa pemahaman kebijakan yang baik dapat memicu inovasi pedagogis karena guru memiliki peta jalan yang jelas (policy roadmap) untuk bertindak. Ketika guru memahami arah dan filosofi di balik kebijakan (misalnya, filosofi Kurikulum Merdeka yang menekankan pada kompetensi nyata, bukan konten), mereka akan merasa lebih berdaya (empowered) untuk keluar dari rutinitas pembelajaran konvensional dan berani menciptakan solusi yang kontekstual. Inovasi-inovasi ini juga memperkuat keterhubungan madrasah dengan kebijakan nasional (Ramadhani, 2024), mengubah madrasah dari unit pelaksana menjadi agen adaptif yang berdaya saing.

Implementasi Moderasi Beragama Yang Kontekstual

Salah satu dampak kualitatif paling menonjol adalah kemampuan peserta merumuskan solusi praktis untuk mengintegrasikan kebijakan moderasi beragama. Peserta secara kolektif menyadari bahwa moderasi harus ditanamkan melalui praktik nyata, seperti lomba karya tulis Islami bertema toleransi dan diskusi lintas kelas. Fenomena ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan bahwa kebijakan nasional harus melewati tahap adaptasi lokal (local adaptation) agar efektif. Guru dan pengelola madrasah, setelah literat, mampu mengadaptasi kebijakan moderasi beragama yang bersifat makro menjadi program mikro yang sesuai dengan budaya dan kondisi siswa di Lampung Utara. Hal ini membuktikan bahwa program pengabdian berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu memberdayakan guru sebagai developer kebijakan di tingkat madrasah. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini telah berhasil mengubah pola pikir dan kapasitas guru madrasah di Lampung Utara.

Tantangan ke depan, seperti keterbatasan sarana teknologi dan perlunya pendampingan berkelanjutan, menuntut kolaborasi yang lebih luas dengan stakeholder untuk menjamin keberlanjutan dampak positif program.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada Penguatan Literasi Kebijakan Pendidikan PAI bagi Guru dan Pengelola Madrasah di Kabupaten Lampung Utara telah mencapai tujuan utamanya secara komprehensif. Pertama, berdasarkan data hasil pre-test dan post-test serta observasi, program ini berhasil meningkatkan pemahaman kognitif dan keterampilan analitis peserta terhadap kebijakan pendidikan PAI yang strategis, seperti Kurikulum Merdeka, moderasi beragama, dan regulasi asesmen. Kedua, penguatan literasi kebijakan ini terbukti berdampak langsung pada peningkatan kualitas praktik pedagogis dan manajemen madrasah. Guru yang literat menjadi lebih proaktif, ditandai dengan munculnya inovasi pembelajaran (seperti pengembangan Modul Ajar, Asesmen Autentik, dan Project Based Learning) serta program sekolah yang selaras dengan kebijakan nasional, misalnya dalam mengintegrasikan nilai moderasi beragama ke dalam budaya dan kegiatan madrasah. Ketiga, keberhasilan program ini menegaskan bahwa literasi kebijakan berfungsi sebagai katalisator penguatan profesionalisme guru dan pengelola madrasah. Dengan adanya kesadaran untuk bertindak berdasarkan regulasi yang berlaku, madrasah di Lampung Utara menunjukkan keselarasan yang lebih baik dengan visi pendidikan Islam nasional. Secara keseluruhan, kegiatan ini berkontribusi dalam menyediakan model pendampingan penguatan literasi kebijakan yang kontekstual dan adaptif bagi madrasah di wilayah yang menghadapi tantangan keterbatasan akses informasi dan dukungan teknis.

Berdasarkan temuan dan capaian yang diperoleh, diajukan beberapa rekomendasi strategis untuk keberlanjutan dan perluasan dampak program:

1. Keberlanjutan Program dan Kolaborasi Jangka Panjang: Disarankan agar program penguatan literasi kebijakan PAI ini dilaksanakan secara berkelanjutan dengan pola pendampingan jangka panjang. Perguruan tinggi, Pemerintah Daerah, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama harus berkolaborasi untuk menciptakan mekanisme belajar yang konsisten, mengingat dinamika perubahan kebijakan pendidikan yang tinggi.
2. Peningkatan Infrastruktur Literasi Digital: Mengingat regulasi pendidikan saat ini banyak didistribusikan melalui platform daring, dukungan sarana dan prasarana literasi digital di madrasah perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah atau pihak swasta didorong untuk membantu pengadaan infrastruktur teknologi yang memadai, sehingga guru dan pengelola madrasah memiliki akses tanpa hambatan terhadap informasi kebijakan terbaru.
3. Pengembangan Budaya Profesionalisme Berbasis Kebijakan: Guru dan pengelola madrasah diimbau untuk menjadikan literasi kebijakan sebagai bagian integral dari budaya profesionalisme. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembentukan Komunitas Belajar Guru (KLG) atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang secara khusus berfokus pada kajian dan interpretasi kebijakan pendidikan, sehingga proses dialog reflektif dan berbagi praktik baik dapat terus berlangsung secara mandiri di lingkungan madrasah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung yang telah memberikan izin, dukungan, dan fasilitasi sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Apresiasi juga disampaikan kepada para kepala madrasah, guru, serta pengelola lembaga pendidikan yang telah berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari sosialisasi, workshop, hingga pendampingan. Tanpa kehadiran dan keterlibatan mereka, kegiatan ini tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Ucapan

terima kasih juga ditujukan kepada tim pengabdian dan rekan-rekan dosen yang telah bekerja sama dengan penuh dedikasi dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program ini. Tidak lupa, penghargaan diberikan kepada mahasiswa yang turut membantu dalam proses dokumentasi dan pendampingan teknis. Seluruh kontribusi yang diberikan telah menjadi bagian penting dalam keberhasilan program penguatan literasi kebijakan pendidikan PAI di madrasah Lampung Utara.

KONFLIK KEPENTINGAN

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreini, H. (2022). *Membaca Puisi Sebagai Penguatan Literasi Bagi Guru-Guru SD Swasta Kartini Medan*. Akademia Pustaka. https://files.osf.io/v1/resources/cxs8b_v1/providers/osfstorage/63a061651d72bc0d0a1baac9?action=download&direct&version=1#page=114
- Ghofururrohim, A., Amirudin, & Jaenullah. (2025). Sustaining Tradition in Modern Times: The Educational System of Salafiyah Boarding School at Darul A'mal Metro City. *Bulletin of Pedagogical Research*, 5(1), 145–158. <https://doi.org/10.51278/bpr.v5i1.1793>
- Junaedi, E. (2025). *Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Meningkatkan Karakter Peserta Didik di SMPN 1 Rumbia Lampung Tengah [Masters, UIN Jurai Siwo Lampung]*. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/11855/>
- Miskiyyah, S. Z., Puspita, P. I., Dewi, T. B. T., Mu'izzah, R., Febriyanti, A. A., & Sutrisno, S. (2025). Integrasi Pembelajaran Berbasis Budaya Dan Kearifan Lokal Dalam Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah: Analisis Literatur Tentang Model Dan Implementasinya. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(2), 618–632. <https://doi.org/10.34125/jmp.v10i2.589>
- Nurhabibi, N., Arifannisa, A., Ismail, D., Kuswandi, D., Anggraeni, A. F. D. G., & Aji, Y. A. (2025). Strategi Lembaga Pendidikan Islam dalam Membentuk Karakter Siswa di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Indonesia : Teori, Penelitian, Dan Inovasi*, 5(2). <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i2.1527>
- Nurhadi, M. W. J., Wijaya, A., Baiturrahman, R., & Solihah, R. (2025). Peran Teknologi, ICT, dan Media Sosial Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Indonesia : Teori, Penelitian, Dan Inovasi*, 5(4). <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i4.1727>
- Ramadhani, S. A. (2024). *Seminar Penelitian Tindakan Kelas bagi Guru SMP Al-Firdaus Batanghari Lampung Timur: Upaya Penguatan Peran Guru sebagai Researcher dalam Pengembangan Kurikulum*. Akademia Pustaka.
- Rizki, A. P. (2022). *Kreativitas Guru Dalam Pembelajaran Akidah Akhlak Pada Peserta Didik MA. Riyadhus Shalihin Bunga Mayang Lampung Utara [Diploma, UIN RADEN INTAN LAMPUNG]*. <https://repository.radenintan.ac.id/20284/>
- Sholihah, S. A., & Khoiriyah, K. (2024). Literasi Keagamaan sebagai Pondasi Pengembangan Karakter Religius Siswa. *Al-Fikri: Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam*, 7(2), 19–39. <https://doi.org/10.30659/jspi.7.2.19-39>
- Siti Listiyana, L. (2020). *Implementasi Sistem Reward And Punishment Dalam Pelaksanaan Ibadah Agama Islam Di Smpn 7 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara [Masters, UIN Raden Intan Lampung]*. <http://repository.radenintan.ac.id/>